
ARTICLE

Optimalisasi Kinerja BPBD dalam Diseminasi Informasi Mitigasi Bencana Tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus

Rizki Astuti^{1*}, Simon Sumanjoyo Hutagalung², Dewie Brima Atika³

^{1,2,3} Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

How to cite: Astuti, R., Hutagalung, S.S, Atika, D.B., (2022) Optimalisasi Kinerja BPBD dalam Diseminasi Informasi Mitigasi Bencana Tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. *Administrativa* (4) 2

Article History

Diterima: 9 November 2021

Ditetapkan: 10 Mei 2022

Keywords:

Performance Optimization, Information Dissemination, Tsunami Disaster Mitigation

ABSTRACT

Disaster management programs are a priority for the government because Indonesia is a country that is prone to disasters. This study aims to obtain an overview of the performance and efforts of BPBD in optimizing the dissemination of information on tsunami disaster mitigation in Kotaagung District, Tanggamus Regency. This research is a type of qualitative descriptive research. The informants in this study amounted to 11 informants and the data collection techniques that researchers used in this study were observation, interviews, and documentation. The results of this study based on 7 (seven) indicators stated that the performance of the BPBD of Tanggamus Regency based on the objective aspect was optimal because the entire community not only knew the objectives of CBDRM based on the activities that had been arranged in the BPBD strategic plan of Tanggamus Regency through socialization and disaster schools. However, the BPBD of Tanggamus Regency itself has also carried out simulation activities with the community and the community has learned things related to tsunami disaster mitigation activities. Meanwhile, the performance of the Tanggamus Regency BPBD based on the standard aspect, equipment completeness aspect, apparatus competency aspect, motive aspect, opportunity aspect and feedback aspect was declared not optimal because it was constrained by funds that affected all aspects of measuring the optimal performance of the Tanggamus Regency BPBD in disseminating information on tsunami disaster mitigation in Indonesia. Kotaagung District, Tanggamus Regency.

Kata Kunci:

Optimalisasi Kinerja, Diseminasi Informasi, Mitigasi Bencana Tsunami

ABSTRAK

Program penanggulangan bencana menjadi prioritas pemerintah karena Indonesia adalah negara yang rawan akan kejadian bencana. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja serta upaya BPBD dalam melakukan pengoptimalan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang informan dan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini berdasarkan 7 (tujuh) indikator menyatakan

bahwasanya kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus berdasarkan aspek tujuan telah optimal karena seluruh masyarakat tidak hanya telah mengetahui tujuan dari PRBBK berdasarkan kegiatan yang telah tersusun di dalam renstra BPBD Kabupaten Tanggamus melalui sosialisasi dan sekolah kebencanaan. Akan tetapi, BPBD Kabupaten Tanggamus sendiri juga telah melakukan kegiatan simulasi bersama masyarakat serta masyarakat telah mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan mitigasi bencana tsunami. Sedangkan kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus berdasarkan aspek standar, aspek kelengkapan peralatan, aspek kompetensi aparatur, aspek motif, aspek peluang dan aspek umpan balik dinyatakan belum optimal karena terkendala oleh dana yang mempengaruhi segala aspek pengukur keoptimalan kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus.

A. PENDAHULUAN

Program penanggulangan bencana menjadi prioritas pemerintah karena Indonesia adalah negara yang rawan akan kejadian bencana. Hal ini telah dibahas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2014-2018. Apabila dilihat dari ancaman bahaya bencana, Indonesia berada pada urutan ke 12 dari 35 negara dengan risiko kematian tertinggi dunia. Pernyataan tersebut didukung oleh *United Nation International Strategy for Disaster Reduction* (UNISDR dalam Tamitiadini, 2019). Indonesia menduduki peringkat pertama dengan jumlah korban terbanyak di dunia dalam kasus bencana tsunami dan tanah longsor (BNPB dalam Tamitiadini, 2019).

Kabupaten Tanggamus merupakan daerah yang berpotensi mengalami bencana tsunami tertinggi di Lampung. Wilayah Kotaagung masih termasuk bagian pegunungan busur belakang (*back arc*) dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang terbentuk akibat adanya aktivitas subduksi lempeng tektonik aktif Samudra Hindia-Australia terhadap lempeng Eurasia di sebelah barat. Pada tahun 2003 wilayah Kotaagung Timur dan Limau pernah mengalami gempa. Gempa yang terjadi ini berlangsung hingga puluhan kali sehari dalam kurun waktu 2 (dua) bulan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Tanggamus dilalui oleh 3 (tiga) sumber potensi bencana tsunami berdasarkan jalur patahan lempeng bumi dimana terdapat 3 (tiga) sumber potensi ini meliputi jalur subduksi atau lempeng benua Indo Australia-Eurasia, Patahan Bukit Barisan, serta potensi volkano tsunami dari Gunung Anak Krakatau (Umarali dalam Hutagalung, 2019).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan pasal 36 mengamanatkan setiap daerah harus mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tanggamus adalah melalui pembentukan desa tangguh bencana (*destana*) di Desa Datarajan, Kelurahan Pasar Madang dan Kelurahan Baros.. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 terkait fungsi dan tugas BPBD dan BNPB sebagai badan penyelenggara penanggulangan bencana daerah dan nasional.

Pengembangan kelurahan/desa tangguh bencana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis penanggulangan bencana, meningkatkan kerja sama antara para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli (Prastika, 2020).

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) merupakan salah satu kegiatan dari BPBD pendukung program destana dimana melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya. Bencana merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya 1 (satu) institusi saja melainkan tanggung jawab bersama untuk menekan dampak atau risiko tingginya kerusakan dan angka kematian. Masyarakat pasti akan menyalahkan institusi apabila hal-hal tidak diinginkan terjadi. Komunikasi dalam melakukan penanggulangan bencana tsunami di Kabupaten Tanggamus sangat diperlukan antara BPBD Kabupaten Tanggamus, desa tangguh bencana (destana), dan masyarakat itu sendiri agar tidak terjadi *miscommunication*.

Diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan informan, terdapat permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Kotaagung terkait dengan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami yaitu:

1. Sangat sulit meyakinkan dan mengajak masyarakat untuk melakukan antisipasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
2. Selama pandemi *covid-19* ini sosialisasi dan simulasi bencana tsunami tidak dilakukan oleh pihak BPBD dan Destana
3. Masih banyak masyarakat Kabupaten Tanggamus bahkan masyarakat Kotaagung itu sendiri yang tidak mengetahui keberadaannya sirine penanda tsunami tersebut karena minimnya pemberitahuan
4. Pihak BPBD tidak menyebarkan spanduk-spanduk ataupun pembuatan film yang berisikan tentang dampak-dampak kronologis alam yang ada di Teluk Semangka di daerah pantai dan permukiman ramai
5. Belum adanya *shelter* (tempat perkumpulan) utama seperti yang ada di Aceh serta belum adanya tenda dan dapur umum untuk desa tangguh bencana itu sendiri

Diseminasi informasi merupakan suatu kegiatan bagian dalam proses komunikasi bencana yang panjang. Perlu adanya rancangan yang benar terhadap penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh unsur pelaksana dalam melakukan diseminasi informasi mitigasi bencana pada publik atau masyarakat. Diseminasi informasi tidak hanya sekedar menginformasikan sesuatu yang berkaitan tentang kebencanaan, namun juga merupakan wujud transparansi kinerja dan sebagai prasarana pendorong publik turut serta berkontribusi terhadap penanganan bencana yang ada (Darmasetiadi, 2019). Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan menitikberatkan pada upaya BPBD untuk mewujudkan optimalisasi diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan apakah kinerja yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tanggamus sudah optimal atau belum.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Organisasi

Mangkunegara (2017) menjelaskan kinerja secara lebih luas yaitu kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan Menurut Quansah (2013) kinerja organisasi adalah hasil akhir organisasi yang diukur berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwasanya kata kinerja dalam kinerja

organisasi berasal dari kata *job performance* (prestasi kerja) yaitu hasil kerja suatu organisasi yang dilihat dari segi kualitas dan kuantitas yang dicapai dan berdasarkan tujuan dan sasarannya. Sehingga mampu mengetahui keoptimalan kinerja organisasi selama satu periode.

Faktor yang mempengaruhi ukuran kinerja ada 2 menurut Quansah (2013), yaitu 1) Tujuan dan 2) Sasaran yang direncanakan. Kinerja sebuah organisasi tidak dapat dicapai hanya dari sisi internal saja namun telah terbukti pencapaian kinerja organisasi dipengaruhi oleh banyak faktor yang berperan menciptakan keberhasilan maupun kegagalannya. Berikut ini terdapat indikator pengukur kinerja organisasi menurut Wibowo (Marjaya, 2019) ada 7 (tujuh) yaitu:

1. Tujuan
Merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Kinerja organisasi dapat dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Standar
Merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai tanpa standar. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja organisasi dapat dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan.
3. Kelengkapan Peralatan
Merupakan sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Kelengkapan peralatan merupakan faktor penunjang untuk mencapai tujuan.
4. Kompetensi
Merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan suatu pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
5. Motif
Merupakan alasan atau mendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu.
6. Peluang
Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya.
7. Umpan Balik
Umpan balik antar tujuan, standar bersifat saling berkaitan. Umpan balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

Pendapat di atas menurut peneliti sudah cukup lengkap dan menyeluruh. Sehingga mampu digunakan oleh peneliti untuk mengukur kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus.

Tujuan pengukuran kinerja sektor publik menurut Mahmudi (2013) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*
5. Memotivasi pegawai
6. Menciptakan akuntabilitas publik

Penanggulangan Bencana

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Ma'arif, 2019). Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan pengurangan risiko jangka panjang.

Komunikasi manajemen bencana merupakan suatu konsep dasar dari upaya pembahasan penyebarluasan informasi mengenai kebencanaan. Menurut Merse (Darmasetiadi, 2019) diseminasi informasi adalah suatu bentuk komunikasi untuk menyampaikan atau menyebarluaskan informasi atau pesan dari pemerintah sebagai komunikator kepada masyarakat.

Menurut Schramm (Arifin, 2016) mengatakan bahwa diseminasi informasi dapat dikatakan optimal jika 1) Pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat dan 2) Komunikasi berperilaku sesuai dengan keinginan komunikator.

Untuk mengoptimalkan strategi dari diseminasi informasi, Siswandi menjelaskan bahwa pemerintah harus berfokus pada 2 (dua) aspek yaitu menerapkan teori STP dan Standar Operasional Pelaksanaan. Teori STP merupakan salah satu inti pembahasan dari pemasaran modern di mana menekankan STP (*Segmentation, Target, and Positioning*) dalam upaya yang memperjelas kebutuhan informasi berdasarkan penerimanya. Tjiptono (2012) menjelaskan *segmentation* dalam hal ini upaya untuk mengelompokkan publik dari informasi kebencanaan yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebagai komunikator berkaitan dengan kebutuhan informasi yang ada. Kebutuhan informasi itu pun sangat spesifik dalam bidang kebencanaan.

Tjiptono (2012) menjelaskan mengenai *target*, pemerintah harus dapat menentukan jenis publik yang menjadi prioritas untuk dijadikan target utama dalam penyampaian informasi kebencanaan dengan menjalankan fungsi-fungsi *segmentation*. Kemudian yang terakhir Tjiptono (2012) menjelaskan mengenai *positioning*, dimana usaha pemerintah dalam upaya menyebarluaskan nilai tertentu dalam informasi kebencanaan kepada publik. Penerapan teori STP dalam diseminasi informasi tidak hanya sekedar menyebarluaskan pesan saja namun harus dikemas dengan topik yang berkaitan dengan kebencanaan. Oleh karena itu pemerintah perlu memiliki Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) sebagai acuan dan mekanisme dalam menentukan konten informasi yang disebarkan dan bentuk kemasannya.

Pemahaman yang kurang tentang bencana menyebabkan masyarakat yang rentan akan lebih berisiko. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah sebuah kegiatan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengurangi risiko-risiko bencana. PRB bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan (Paripurno, 2011).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja serta upaya BPBD dalam melakukan pengoptimalan diseminasi informasi mitigasi bencana

tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan indikator pengukur optimalisasi kinerja organisasi menurut teori dari Wibowo (Marjaya, 2019) berdasarkan 7 (tujuh) aspek antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Tujuan
2. Aspek Standar
3. Aspek Kelengkapan Peralatan
4. Aspek Kompetensi Aparatur
5. Aspek Motif
6. Aspek Peluang
7. Aspek Umpan Balik

Adapun jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data skunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 11 informan dan observasi. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari catatan atau arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Tujuan

Menurut Wibowo (Marjaya, 2019) aspek tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Kinerja organisasi dapat dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

BPBD Kabupaten Tanggamus memiliki 3 (tiga) tujuan dalam Renstra-PDnya yaitu sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah
2. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana
3. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal mencakup penanganan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan melalui wawancara 11 informan diketahui bahwasanya kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam aspek tujuan ini sudah optimal karena seluruh masyarakat tidak hanya telah mengetahui tujuan dari PRBBK berdasarkan kegiatan yang telah tersusun di dalam renstra BPBD Kabupaten Tanggamus melalui sosialisasi dan sekolah kebencanaan. Akan tetapi, BPBD Kabupaten Tanggamus sendiri juga telah melakukan kegiatan simulasi bersama masyarakat serta masyarakat telah mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan mitigasi bencana tsunami. Tak hanya itu, kegiatan yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tanggamus tersebut merupakan suatu bentuk pengoptimalan peran dan fungsi BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana serta sebagai bentuk untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal mencakup penanganan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Aspek Standar

Menurut Wibowo (Marjaya, 2019) kinerja organisasi dapat dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan melalui wawancara 11 informan diketahui bahwasanya kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam aspek standar ini optimal karena dalam pelaksanaan kegiatannya telah berpedoman pada SOP yang ada serta fungsi SOP ini sendiri telah diketahui oleh Lurah Pasar Madang, Sekretaris Lurah Baros, Destana Kelurahan Pasar Madang dan Destana Kelurahan Baros. BPBD

Kabupaten Tanggamus pula mengelompokkan masyarakat menjadi beberapa kategori yaitu anak-anak, dewasa, dan lansia atau manula sehingga dapat mengukur waktu yang diperlukan untuk mencapai lokasi yang aman atau lokasi yang lebih tinggi. Namun dikarenakan indikator pengukur keoptimalan kinerja organisasi menurut Wibowo (Marjaya, 2019) merupakan satu kesatuan maka kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam aspek standar ini dinyatakan belum optimal karena memiliki keterbatasan arsip dokumen yang sudah menjadi salah satu bentuk SOP yang telah diatur di dalamnya mengenai kelengkapan dokumen serta masih adanya beberapa masyarakat yang merasa kurang puas terhadap tindakan atau ketangkasan dan kecepatan dari BPBD Kabupaten Tanggamus itu sendiri dalam merespon suatu bencana yang terjadi.

Aspek Kelengkapan Peralatan

Menurut Wibowo (Marjaya, 2019) kelengkapan peralatan merupakan faktor penunjang untuk mencapai tujuan. Kelengkapan peralatan juga merupakan hal yang krusial dan juga merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dapat dilakukan dalam menghadapi suatu situasi yang dinilai berbahaya. Komunikasi manajemen bencana merupakan suatu konsep dasar dari upaya pembahasan penyebaran informasi mengenai kebencanaan. PRB (Pengurangan Risiko Bencana) bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan (Paripurno, 2011).

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan melalui wawancara 11 informan diketahui bahwasanya BPBD Kabupaten Tanggamus memiliki peralatan yang lengkap dalam menyelenggarakan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami. Seluruh masyarakat pun telah mengetahui fungsi dari papan rambu-rambu jalur evakuasi dan fungsi dari sirine penanda terjadinya tsunami yang telah terpasang di Taman Kota. Namun, terdapat masalah terkait kelengkapan peralatan ini yaitu BPBD Kabupaten Tanggamus tidak menyebarkan spanduk-spanduk ataupun pembuatan film yang berisikan tentang dampak-dampak kronologis alam yang ada di Teluk Semangka di daerah pantai dan permukiman ramai.

Ketiadaannya posko yang seharusnya ada untuk melihat kondisi alam di pantai pun menjadi masalah. Sehingga apabila sewaktu-waktu terjadinya gempa, tidak adanya petugas yang dapat mengecek kondisi laut dan mampu memberikan informasi secara akurat sebelum BPBD Kabupaten Tanggamus datang ke lokasi. Kemudian, hingga saat ini di Kecamatan Kotaagung belum adanya tempat evakuasi utama seperti yang ada di Aceh karena terkendala oleh dana. Sehingga akan menyebabkan tersebarnya masyarakat dimana-mana dan tidak terkontrol keberadaannya.

Dana merupakan masalah yang tidak dapat dihindari. Sehingga permasalahan dana akan selalu ada dalam pelaksanaannya suatu kegiatan. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwasanya kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam aspek kelengkapan peralatan ini dinyatakan belum optimal karena masih banyak permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh masyarakat.

Aspek Kompetensi Aparatur

Menurut Wibowo (Marjaya, 2019) aspek kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan suatu pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan salah satunya dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Wiley (Pratama, 2019) yaitu Sumber Daya

Manusia (SDM) merupakan pilar penyangga utama sekaligus roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan falsafah *man behind the gun* yaitu roda organisasi sangat tergantung pada perilaku-perilaku manusia yang bekerja di dalamnya. Keahlian dan kompetensi aparatur mempengaruhi kepuasan publik dalam terselenggaranya suatu kegiatan. Menurut Barata (2014) kompetensi aparatur adalah kemampuan, kehandalan, pengetahuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan melalui wawancara 11 informan diketahui bahwasanya kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam aspek kompetensi aparatur ini belum optimal karena pada bagian tugas aparatur yaitu bagian pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana belum terlaksana secara maksimal. Permasalahan ini berkaitan pula dengan aspek standar dan aspek kelengkapan peralatan yang menyatakan bahwasanya dokumen yang didapatkan oleh BPBD Kabupaten Tanggamus tidak lengkap serta selama proses sosialisasi dan simulasi bencana tsunami sangat sulit meyakinkan dan mengajak masyarakat melakukan antisipasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana karena masyarakat tidak pernah merasakan bencana tsunami itu langsung.

Aspek Motif

Menurut Wibowo (Marjaya, 2019) aspek motif merupakan alasan mendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Banyak faktor yang dapat meningkatkan kinerja pegawai, salah satunya adalah melalui motivasi kerja. Menurut Siagian (2014) selain uang, secara psikologis, seorang pegawai atau aparatur menginginkan pengakuan yang memadai akan hasil kinerjanya. Beberapa orang akan termotivasi untuk melihat namanya tertulis di sebuah piagam, tergantung di dinding, di dalam majalah perusahaan, atau disebutkan di dalam suatu seremoni. Sejalan dengan Siagian, Mesran (2018) juga menyatakan bahwa mendapatkan penghargaan atas prestasi karena kerja kerasnya merupakan suatu kebanggaan tersendiri, tidak dipungkiri bahwa banyak orang yang bekerja keras untuk mengejar prestasi karena dengan prestasi akan membuka jalan untuk mengembangkan karirnya. Wujud memotivasi kinerja pegawai atau aparatur agar menjadi lebih baik dapat dilakukan dengan cara menerapkan sistem *reward and punishment*. Sesuai dengan pendapat dari Nitisemito (2012) yang menyatakan bahwa memotivasi kinerja pegawai dapat dilakukan dengan cara pemberian *reward and punishment*.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan melalui wawancara 1 informan diketahui bahwasanya BPBD Kabupaten Tanggamus telah menerapkan sistem *reward and punishment*. BPBD Kabupaten Tanggamus dalam melakukan kegiatan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami dilakukan secara sukarela dan termotivasi dalam melaksanakan penanggulangan bencana tsunami di wilayah Kotaagung untuk mengurangi risiko bencana karena Kabupaten Tanggamus merupakan daerah yang berpotensi mengalami bencana tsunami tertinggi di Lampung. BPBD Kabupaten Tanggamus telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan sekolah kebencanaan agar masyarakat dapat menambah pengetahuan mengenai kebencanaan. Namun, BPBD Kabupaten Tanggamus sangat sulit meyakinkan dan mengajak masyarakat melakukan antisipasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana karena masyarakat tidak pernah merasakan bencana tsunami itu langsung.

Tak hanya terkendala pada masyarakatnya, BPBD Kabupaten Tanggamus sendiri mengalami permasalahan pada dana. Sehingga hal ini tentu membuat BPBD Kabupaten Tanggamus berpikir keras untuk tetap melakukan kegiatan diseminasi informasi mitigasi bencana ini semaksimal mungkin. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam aspek motif ini masih belum optimal karena masalah dana ini juga berkenaan dengan motivasi aparatur dan keberlanjutan

kegiatan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami dengan forum yang telah dibentuk yaitu destana.

Aspek Peluang

Menurut Wibowo (Marjaya, 2019) berkenaan dengan aspek peluang yaitu pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Menurut Hasibuan (Jamil, 2016) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Salah satu aspek penting dalam organisasi adalah komitmen. Menurut Mathis dan Jackson (Budiono, 2016) komitmen organisasi adalah derajat yang mana karyawan percaya dan menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasi.

Pengembangan aparatur dengan melakukan pelatihan merupakan suatu upaya yang dapat mendorong prestasi aparaturnya dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur. Sejalan dengan pernyataan di atas, Hasibuan (2011) pun mengatakan bahwa untuk mencapai kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi atau instansi, para pegawai harus mendapatkan program pengembangan pegawai yang memadai sehingga pegawai terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Tujuan pengembangan SDM ini adalah untuk memperbaiki kinerja pegawai, dengan adanya pengembangan SDM diharapkan dapat memperbaiki pengetahuan, keterampilan, serta memperbaiki sikap pegawai itu sendiri terhadap tugas-tugasnya.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan melalui wawancara 11 informan diketahui bahwasanya BPBD Kabupaten Tanggamus telah membentuk sebuah komunitas yang memiliki tugas untuk menjalankan program desa tangguh bencana yaitu destana (desa tangguh bencana). BPBD Kabupaten Tanggamus juga telah menyelenggarakan pelatihan untuk anggota-anggota destana yang ada dengan pemateri langsung dari aparatur BPBD Kabupaten Tanggamus. Jika kita lihat, pada kegiatan pelatihan ini dapat menambah poin plus aparaturnya karena merupakan salah satu bentuk kemampuan yang dimiliki oleh aparatur yang bekerja di bidangnya.

Kegiatan pelatihan anggota destana ini bertujuan agar kegiatan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di kelurahannya masing-masing dapat terus berjalan dan agar anggota destana tersebut dapat memiliki pemahaman yang lebih baik sehingga mampu memberikan informasi yang baik dan cukup kepada masyarakat. Terselenggaranya kegiatan pelatihan tersebut mampu mendorong anggota masyarakat untuk terus berpikir bahwa dalam penanggulangan bencana tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab di dalamnya namun merupakan tanggung jawab bersama. Dapat kita ketahui pula bahwasanya BPBD Kabupaten Tanggamus telah memberikan pemahaman mengenai solusi dari bencana tsunami itu sendiri serta hal-hal yang berkenaan dengan bencana tsunami. Anggota destana tersebut telah menindaklanjuti kegiatan dari BPBD Kabupaten Tanggamus dan direspon positif oleh masyarakat. Destana ini hanya berjalan selama 1 (satu) tahun dan sudah 2 (dua) tahun ini tidak berjalan lagi dimana kegiatan diseminasi informasi mitigasi bencana menjadi terhenti.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam aspek peluang ini belum optimal walaupun BPBD Kabupaten Tanggamus telah membentuk destana dan sudah menyelenggarakan pelatihan. Akan tetapi, masih ada masyarakat yang sulit untuk diajak melakukan kegiatan antisipasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana itu sendiri serta destana ini sudah tidak berjalan lagi dan kegiatan diseminasi informasi menjadi terhenti. Sehingga mampu membuat tingginya risiko yang disebabkan oleh bencana tsunami itu sendiri.

Aspek Umpan Balik

Menurut Wibowo (Marjaya, 2019) aspek umpan balik antar tujuan dan standar bersifat saling berkaitan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja. Kinerja organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi ada faktor internal individu yaitu salah satunya motivasi (Anderson dalam Hasbullah, 2018). Perilaku kontributif pada pencapaian kinerja yang baik menjadi perhatian organisasi dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan melalui wawancara 5 informan diketahui bahwasanya motivasi dinyatakan berdampak atau berpengaruh pada umpan balik aparatur. Kendala yang dirasakan berpengaruh terhadap motivasi aparatur yaitu dana. Kendala pada dana ini pun berdampak terhadap keberlanjutan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami seperti ketidakaktifan forum destana yang telah dibentuk oleh BPBD Kabupaten Tanggamus yang menyebabkan keterbatasan arsip dokumen yang sudah menjadi salah satu bentuk SOP yang telah diatur di dalamnya mengenai kelengkapan dokumen dan kepuasan masyarakat terhadap tindakan atau ketangkasan dan kecepatan dari BPBD Kabupaten Tanggamus itu sendiri dalam merespon suatu bencana yang terjadi. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dinyatakan bahwasanya kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam aspek umpan balik ini belum optimal.

E. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait optimalisasi kinerja BPBD dalam diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus berdasarkan 7 (tujuh) indikator menurut Wibowo (Marjaya, 2019) dapat diambil kesimpulan bahwasanya kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus berdasarkan aspek tujuan telah optimal karena seluruh masyarakat tidak hanya telah mengetahui tujuan dari PRBBK berdasarkan kegiatan yang telah tersusun di dalam renstra BPBD Kabupaten Tanggamus melalui sosialisasi dan sekolah kebencanaan. Akan tetapi, BPBD Kabupaten Tanggamus sendiri juga telah melakukan kegiatan simulasi bersama masyarakat serta masyarakat telah mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan mitigasi bencana tsunami. Tak hanya itu, kegiatan yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tanggamus tersebut merupakan suatu bentuk pengoptimalan peran dan fungsi BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana serta sebagai bentuk untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal mencakup penanganan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Sedangkan kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus berdasarkan aspek standar, aspek kelengkapan peralatan, aspek kompetensi aparatur, aspek motif, aspek peluang dan aspek umpan balik dinyatakan belum optimal karena terkendala oleh dana yang mempengaruhi segala aspek pengukur keoptimalan kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memiliki beberapa saran yang perlu disampaikan dengan harapan dapat menjadi bahan untuk peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Tanggamus dalam mengoptimalkan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu:

1. Pengoptimalan aspek tujuan dan aspek peluang dapat dilakukan dengan mulai aktifkan kembali destana, selenggarakan kegiatan pelatihan kepada anggota destana setiap 1 (satu) bulan sekali secara rutin, lakukan monitoring dengan destana, lakukan pendekatan

- dengan masyarakat secara langsung tanpa hanya dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara teori saja di dalam satu ruangan.
2. Pengoptimalan aspek standar dan aspek kompetensi aparatur dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan monitoring terkait pengadaan arsip dengan destana sesering mungkin, lakukan simulasi secara rutin untuk melatih ketanggapan dan ketangkasan aparatur BPBD maupun anggota destana dalam merespon suatu bencana yang terjadi, lakukan pendekatan dengan masyarakat secara langsung tanpa hanya dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara teori saja di dalam satu ruangan.
 3. Pengoptimalan aspek kelengkapan peralatan dapat dilakukan dengan melakukan pengajuan dana ulang ke pemerintah pusat dengan melakukan pengadaan peralatan dan perlengkapan secara berkala di Kelurahan atau desa.
 4. Pengoptimalan aspek motif dapat dilakukan dengan mempertahankan semangat aparatur BPBD dalam melakukan kegiatan PRBBK, tingkatkan motivasi aparatur BPBD dengan cara memberikan bonus apabila kompetensi yang dimiliki oleh aparatur baik dan memberikan sanksi apabila aparatur melakukan kelalaian dalam pekerjaannya.
 5. Pengoptimalan aspek umpan balik dapat dilakukan dengan melakukan pengajuan dana ulang ke pemerintah pusat untuk menindaklanjuti kegiatan diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami sehingga destana ini sendiri dapat berjalan kembali, melakukan monitoring terjadwal, *brown bag lunch* (makan siang bersama setiap seminggu sekali), memberikan pujian di depan umum sehingga memotivasi aparatur untuk menindaklanjuti diseminasi informasi mitigasi bencana tsunami ini dengan sungguh-sungguh.

REFERENSI

- Arifin, Samsul. 2016. *Kajian Penyelenggaraan Kebijakan Informasi Publik (Studi Evaluasi Program Diseminasi Informasi di Dishubkominformo Kabupaten Bangkalan Tahun 2012-2015)*. Tesis Universitas Airlangga. Diakses di: <http://repository.unair.ac.id/45700/2/TSK.27-16%20Ari%20k.pdf> pada 21 November 2020.
- Barata, A.A. 2014. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Budiono dan Dewi Suryani. 2016. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening pada PT. Kerta Rajasa Raya. *Journal Of Research In Economics And Management* Vol 16 No 1. Universitas Negeri Surabaya.
- Darmasetiadi, D. 2019. Optimalisasi Diseminasi Informasi Pada Mitigasi Bencana. *Jurnal in Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu* Vol 1 No 1.
- Hasbullah. 2018. Analisis Pengaruh Orientasi Umpa Balik dan Orientasi Tujuan Terhadap Kinerja Manajer Pabrik. *Jurnal PASTI* Vol XII No 1. Universitas Mercu Buana.
- Hasibuan. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar Kunci Keberhasilan*. Jakarta: CV Haji Mas.
- Hutagalung, Simon Sumanjoyo., Ita Prihantika, Meiliyana, Dewie Brima Atika. 2019. *Pelatihan Penguatan Resiliensi Siswa Sekolah Menengah Atas Dalam Menghadapi Bencana Alam Pada SMAN 2 Kotaagung Kabupaten Tanggamus*. E-Katalog Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat II 2019. Universitas Lampung: LPPM. Diakses di: <http://repository.lppm.unila.ac.id/view/divisions/FISIP2/2019.html> pada 21 November 2020.
- Jamil, Ade Yusuf. 2016. *BAB II Tinjauan Pustaka*. Skripsi. Universitas Pasundan Bandung. Diakses di:

- <http://repository.unpas.ac.id/11783/5/4.%20BAB%20II%20%28Ade%20Yusup%20Jamil%20122010064%29.pdf> pada 16 September 2021.
- Ma'arif, Syamsul., Eko Budi Sulistio, Simon Sumanjoyo Hutagalung. 2019. *Penyuluhan Manajemen Bencana Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Di Kalangan Pelajar SMA Negeri 2 Kotaagung Kabupaten Tanggamus*. E-katalog Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat II 2019. Universitas Lampung: LPPM. Diakses di: <http://repository.lppm.unila.ac.id/view/divisions/FISIP2/2019.html> pada 21 November 2020.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkunegara, A. P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Cetakan Kesebelas ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marjaya, Indra dan Fajar Pasaribu. 2019. Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* Vol 2 No 1.
- Mesran, dkk. 2018. Implementasi Metode *Electre* dalam Penentuan Karyawan Berprestasi (Studi Kasus: PT. Megarimas Sentosa). *Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika (Jurasik)* Vol 3.
- Nitisemito, Alex S. 2012. *Manajemen Personalia dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Paripurno, Eko Teguh. 2011. *Panduan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Buku 1: pentingnya PRBBK, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Prastika, Inda Sintya. 2020. Desa Tangguh Bencana Tanah Longsor. *Higeia Journal of Public Health Research and Development* Vol 4 No 4. Universitas Negeri Semarang.
- Pratama, Siswa. 2019. Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia, Prasarana dan lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Studi pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Manajemen Tools* Vol 11 No 1.
- Quansah, Nancy. 2013. *The Impact of HRM Practice on Organizational Performance: The Case Study of Some Selected Rural Banks*. Master Thesis. College of Art and Social Science School of Business.
- Siagian, P Sondang. 2014. *Pengembangan Organisasi dan Staf*. Yogyakarta: Balai Pustaka.
- Tamitiadini, Dian., Wayan Weda Asmara Dewi, Isma Adila. 2019. Inovasi Model Mitigasi Bencana Non Struktural Berbasis Komunikasi, Informasi, Koordinasi dan Kerja Sama. *Jurnal Conference on Communication and New Media Studies* Vol.13 No 1, Hal: 41-52.
- Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra. 2012. *Pemasaran Strategik*. Yogyakarta: ANDI.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana